

KEPEMIMPINAN LOKAL ERA PILKADA LANGSUNG

Oleh : Susilo Utomo



Abstract : *The main purpose of this research is to answer problem "figures leadership of Governor". Like what in idealizing by society-electors Central Java in election of governor Central Java 2008 ago. By using method research of survey including 6 sub-province / town, 18 district, 54 countryside / sub-district and 2400 responder, which taking pursuant to multi stage random sampling. In fact elected of Bibit Waluyo - Rustriningsih in election of governor in Central Java because the couple have ideal leadership marking as which desiring by society-electors of Central Java, that is value local leadership society of Central Java.*

Keywords : *local leadership, voting behaviour, governor election.*

Pendahuluan

Pilgub Jateng yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2008 yang lalu diikuti oleh lima pasang calon Gubernur. Yaitu, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung oleh PDIP (31% kursi DPRD Jateng), pasangan Bambang Sadono-Mohammad Adnan diusung oleh Partai Golkar (17% kursi DPRD Jateng), pasangan Agus Suyitno-Kholiq Arif diusung oleh PKB (15% kursi DPRD Jateng), pasangan Mohammad Tamzil-Rozaq Rais diusung oleh PPP dan PAN (PPP 10%, PAN 10%), dan pasangan Sukawi Sutarip-Sudarto diusung oleh PKS dan Partai Demokrat (PKS 7%, Partai Demokrat 10%). Pilgub Jateng tersebut dimenangkan oleh pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang diusung PDIP dengan suara 6.084.261 (43,44%). Urutan kedua ditempati pasangan Bambang Sadono Adnan yang diusung oleh Partai Golkar dengan perolehan 3.192.093 suara (22,79%). Urutan ketiga ditempati oleh pasangan Sukawi Sutarip Sudarto yang diusung oleh PKS dan Partai Demokrat dengan perolehan 2.182.102 suara (15,58%). Pasangan Tamzil Rozaq Rais yang diusung PPP dan PAN menduduki urutan keempat dengan perolehan suara 1.591.243 suara (11,36%). Sebagai juru kunci, pasangan Agus Suyitno-Kholiq Arif yang diusung oleh PKB memperoleh suara 957.343 suara (6,83%)

Kemenangan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam Pilgub Jateng 2008 tersebut di atas membalikkan anggapan selama ini. Pertama, dimana calon kepala daerah yang berasal dari militer dipelbagai daerah sering mengalami kegagalan, sehingga sering calon yang berasal dari TNI diolok-olok sebagai "tank mogok". Fenomena kedua, selama ini calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai besar, terutama Partai Golkar dan PDIP sering kedodoran, karena mesin politiknya sering dianggap tidak berjalan alias macet.

Persoalannya, mengapa kedua fenomena tersebut tidak berlaku pada pilgub Jateng?

Tulisan pendek ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kemenangan Bibit Waluyo-Rustriningsih Pada Pilgub Jateng, terutama dari sisi kepemimpinan lokal yang diharapkan oleh masyarakat pemilih Jateng. Keseluruhan dari substansi tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh FISIP Undip Semarang, sebelum Pilgub Jateng 2008 melakukan pencoblosan

Belajar dari hasil penelitian FISIP Undip tentang Kepemimpinan Lokal dan Perilaku Memilih pada Pilgub Jateng pada tanggal 15 Mei hingga 4 Juni 2008, ada tiga hal penting yang dapat untuk menjelaskan fenomena kemenangan Bibit-Rustri. **Pertama**, tentang konsep kepemimpinan ideal Cagub. **Kedua**, persepsi masyarakat tentang Figur Ideal Cagub dan ketiga tentang kecenderungan perilaku memilih. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian survei, sedang tipe penelitian termasuk dalam kategori penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai sebuah fenomena, yaitu fenomena tentang kemenangan Bibit Waluyo-Rustriningsih pada pilgub Jateng 2008. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, sampel yang dijadikan responden sebanyak 2408 responden yang tersebar dalam 3 Bakorlin, 6 Kabupaten/Kota, 30 Kecamatan, 90 desa/kelurahan, 180 RW/RK, 360 RT.

Kerangka Teoritis. Secara konseptual, perilaku memilih diartikan sebagai keikutsertaan warga masyarakat pada setiap pemilu yang merupakan setiap tindakan membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih (Ramlan Surbakti, 1992, hal 17). Mengapa seseorang/individu memilih partai X/ kandidat X dan bukan partai Y/ kandidat Y atau partai Z/kandidatZ? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang/individu lebih cenderung memilih partai tertentu/kandidat tertentu? Apakah kecenderungan seseorang/individu pada partai/kandidat tertentu bersifat tetap atau berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu, perubahan tempat dan perbedaan budaya? Pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut di atas merupakan salah satu isu sentral dari studi perilaku memilih (*voting behaviour studies*).

Dalam memahami perilaku memilih pada setiap event Pemilu, banyak pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan kecenderungan-kecenderungan perilaku memilih seseorang/individu. Menurut Afan Gaffar (1992:13-15) ada dua model pendekatan yang biasa diterapkan di negara-negara demokratis, yaitu pendekatan Sosiologis dan pendekatan Sosio-psikologis.

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan paling awal dalam tradisi perilaku memilih. Pendekatan ini berasal dari Eropa atau sering disebut sebagai Madzhab Columbia. Pendekatan ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku memilih seseorang atau individu ditentukan oleh karakteristik Sosiologis, terutama kelas sosial, agama, kelompok etnik, dan kedaerahan. Seorang pemilih memilih Partai/ Kandidat tertentu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik sosiologis Partai/ Kandidat tersebut. Jika seorang pemilih dengan latar belakang kelas sosial bawah, cenderung akan memilih Partai/Kandidat yang

dipandang dapat memperjuangkan atau memperbaiki kelas sosial dan yang menjanjikan perubahan sosial mereka. Sebaliknya, orang-orang kaya akan cenderung memilih Partai-partai konservatif, karena mereka memilih demi Status Quo. Demikian juga seseorang/individu yang beragama Islam, mereka berkecenderungan untuk memilih partai politik/kandidat yang bernafaskan Islam.

Pendekatan Sosio-Psikologis sering disebut pendekatan Michigan. Pendekatan ini lebih banyak memberikan perhatian kepada aspek Psikologis pemilih. Kecenderungan atau pilihan seseorang terhadap Partai/ Kandidat tertentu bukan hanya karena Partai/ Kandidat mempunyai kesamaan latar belakang/ karakteristik sosiologis dengan pemilih, tetapi juga secara psikologis dekat dengan pemilih. Aspek sosiologis dan psikologis ini saling berkaitan saling berhubungan. Sehingga pendekatan ini juga sering disebut sebagai pendekatan sosio-psikologis. Pendekatan ini berasumsi bahwa faktor-faktor kesamaan sosiologis tersebut tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk memilih Partai/ Kandidat tertentu, tapi diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor-faktor sosiologis maupun terhadap Partai Politik/ Kandidat.

Salah satu variabel utama dari pendekatan sosio-psikologis adalah identifikasi seseorang atau individu terhadap Partai Politik. Identifikasi Partai diartikan sebagai perasaan keterlibatan dan rasa memiliki yang ada dalam diri seseorang atau individu terhadap sebuah partai politik. Dengan demikian dapat dikatakan, identifikasi partai (*Partisanship*) adalah sikap dan perasaan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang atau individu. Kedekatan seseorang dengan partai umumnya terbangun melalui pengalaman pribadi dan melalui proses yang panjang. Pengalaman-pengalaman seseorang tersebut sudah barang tentu terkait dengan agen-agen sosialisasi politik seperti keluarga, kawan bermain, sekolah, media masa, teman kerja, maupun kontak dengan tokoh-tokoh politik.

Sosialisasi politik di lingkungan keluarga, sekolah, di lingkungan kerja, dimana seseorang berada sudah barang tentu akan membantu proses pembentukan identitas politik atau identitas partai. Kebiasaan-kebiasaan seseorang membicarakan masalah politik dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, maupun dalam lingkungan sekolah, akan membantu seseorang terlibat dan merasa dekat dengan persoalan-persoalan politik. Jika seseorang hidup dalam lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat, dll) dimana sebuah partai/kandidat disikapi secara positif, maka dengan sendirinya sikap seseorang tersebut akan positif terhadap partai/ kandidat tersebut. Juga orang tua pendukung fanatik partai/ kandidat tertentu akan cenderung menumbuhkan sikap fanatik pada anak atau anggota keluarga yang lain sesuai dengan sikap fanatik orang tua tersebut. Indikator identifikasi kepartaian dapat diukur dengan jalan menanyakan kepada seseorang, seberapa jauh kedekatannya terhadap partai/kandidat tertentu.

Pendekatan lain adalah pendekatan Ekonomi Politik. Pendekatan ini sering dikenal sebagai pendekatan rasional, karena menekankan pentingnya penilaian rasional pemilih terhadap partai/kandidat tertentu. Mengapa seseorang lebih memilih partai/kandidat tertentu, jika dibandingkan dengan partai/kandidat lainnya. Hal ini dijelaskan oleh pendekatan ini dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Pendekatan rasional ini juga menempatkan

pentingnya sikap kritis evaluasi pemilih terhadap semua partai/kandidat yang bersaing dalam Pemilu. Pendekatan ekonomi politik ini sebenarnya diambil dari disiplin ilmu ekonomi (Norpoth, 1996 : 777-778). Ilmuwan politik mengadopsi teori ini untuk menjelaskan perilaku memilih dengan memperhitungkan dampak ekonomi yang mungkin dirasakan kalau ia memilih partai/kandidat tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini biasanya menggunakan indikator perilaku memilih dengan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan evaluasi keadaan ekonomi, percepatan pembangunan, kinerja partai/kandidat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan lain-lain.

Kecenderungan Perilaku Memilih Pada Pilgub. Pendekatan-pendekatan seperti model sosiologi, model psikologi maupun model ekonomi-politik yang dijadikan acuan dalam menjelaskan perilaku memilih di Indonesia, terutama pada Pilkada Langsung ternyata kurang begitu memuaskan. Misalnya pada model sosiologi, di Eropa dimana model ini berasal, dilihat pada status sosial, agama, kelas sosial, sedangkan di Indonesia model Sosiologi jika dilihat dari pelbagai studi perilaku memilih yang pernah dilakukan menggunakan indikator : Agama, Orientasi agama, Jenis kelamin, umur, Etnis, Urbanisasi, kelas Sosial (Eriyanto, 2007 : 17).

Dalam hal Orientasi Agama, orang-orang santri akan cenderung memilih partai yang beraliran ideologi Islam (seperti PPP, PKS, PKB), abangan akan cenderung memilih partai- partai yang menjanjikan perubahan atau perbaikan nasib rakyat kecil/ miskin (seperti PDIP), sedangkan kelompok priyayi akan cenderung memilih partai-partai yang dianggap mapan (seperti Partai Golkar, PAN).

Demikian halnya, kecenderungan perilaku memilih model Sosio-Psikologis. Model ini dalam studi penelitian perilaku memilih, sering menggunakan indikator, identifikasi partai, identifikasi sosial, *patron-client*, daya tarik kepemimpinan (figur). Khusus untuk Figur yang memiliki daya tarik ini, di pelbagai studi yang dilakukan oleh Liddle dan Mujani baik pada tahun 2000 maupun tahun 2007 termasuk kuat dalam mempengaruhi kecenderungan perilaku memilih (Eriyanto, 2007 : 21). Sedang untuk model Ekonomi-politik, indikator yang dipakai dalam mengukur kecenderungan perilaku memilih adalah Evaluasi keadaan ekonomi, kinerja pemerintah, melek huruf, pembangunan, kemiskinan. Sehubungan model ekonomi-politik ini masih baru dan berbagai penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) FISIP UNDIP, di 12 Kabupaten/Kota di Jawa-Tengah, model ini lemah, maka dalam penelitian ini diabaikan. Sehingga indikator kecenderungan perilaku memilih yang dipakai dalam penelitian ini adalah : jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status di masyarakat untuk pendekatan Sosiologis; sedang untuk pendekatan sosio-psikologis menggunakan indikator afiliasi kepartaian dan afiliasi organisasi.

Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Calon Ideal Cagub. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh pengindraan yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus melalui alat reseptornya. stimulus itu kemudian diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu otak dan terjadinya proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan sebagainya, individu mengalami

persepsi (Walgito, 1994: 53)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang berada pada pihak pelaku persepsi (*perceiver*) dalam obyeknya atau target yang dipersepsikan atau dalam konteks situasi dimana persepsi itu dilakukan. Dengan demikian, persepsi berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan tentang obyek atau kejadian pada saat tertentu. Oleh sebab itu, persepsi terjadi kapan saja, stimulus menggerakkan indra.

Persepsi seseorang/individu menurut Stephen P. Robbins (Walgito, 1994: 89-93) terdiri dari:

- a. Faktor Situasi (*the Situational factor*). Tekanan, waktu, sikap orang yang bekerjasama dengan mengambil keputusan dan faktor-faktor situasi lain.
- b. Kebutuhan dan keinginan (*Needs and perceptions*). Persepsi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan orang satu dengan yang lain berbeda-beda, begitu juga keinginannya, sehingga persepsi yang dihasilkan juga berbeda-beda tergantung kebutuhan dan keinginan seseorang.
- c. Emosi dan Persepsi. Keadaan emosi seseorang banyak mempengaruhi persepsi. Emosi yang kuat seperti rasa benci yang amat sangat terhadap seseorang atau terhadap suatu lembaga dapat menyebabkan sikap negative, dan tindakan kurang terpuji.

Dengan kata lain, persepsi itu bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dapat berubah-ubah. Proses perubahan persepsi yang pertama disebabkan oleh proses faal (fisiologi) dari system syaraf pada indera manusia dan yang kedua berasal dari perubahan psikologi. Proses perubahan secara psikologis antara lain dijumpai dalam pembentukan dan perubahan sikap.

Ada dua pemaknaan terhadap sikap (Walgito, 1994 : 71). Makna pertama berkaitan dengan kesiapan seseorang untuk bereaksi secara tertentu terhadap obyek- obyek tertentu. Obyek yang dipikirkan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan benda, orang, issue-issue yang bisa dinilai oleh manusia. Dimensi penilaiannya adalah semua skala positif-negatif, penting-tidak penting, baik-buruk, dan sebagainya. Dengan demikian sikap adalah menempatkan sesuatu obyek pada salah satu skala penilaian. Misalnya, calon gubernur yang bernama ABC, adalah calon yang santun, atas dasar penempatan pada penilaian itulah, orang melakukan tingkah laku selanjutnya terhadap obyek yang dimaksud, tentu saja setelah dipengaruhi oleh pelbagai faktor lain yang datang dari lingkungan (obyek lain, situasi) maupun dari diri sendiri (motivasi keperluan). Jadi makna sikap adalah tingkah laku itu sendiri.

Makna sikap yang kedua adalah potensi tingkah laku atau calon tingkah laku, bukan tingkah laku itu sendiri. Pembentukan sikap dalam psikologi biasanya diterangkan sebagai proses kesadaran (kognisi), proses belajar. Dalam proses belajar yang menjadi fokus utama adalah adanya rangsangan dari luar (stimulus), sedang kognisi yang utama adalah dorongan atau kehendak dari dalam diri sendiri. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan, membuat keputusan bertindak, oleh karena itu ia cenderung tidak mau terikat pada pola-pola tertentu untuk membuat keputusan atau membuat tindakan. Untuk membuat keputusan-keputusan (sikap), membentuk atau merubah sikap, manusia membutuhkan pilihan- pilihan dan perlu diberi pilihan

alasan, keuntungan dan kerugian masing-masing, Dengan diberi pilihan-pilihan, dengan sendirinya seseorang akan merubah sikap, jika ia melihat alternative yang dianggap lebih baik. Dengan demikian konsep persepsi melibatkan tiga unsure yaitu pengetahuan (kognisi), skala penilaian (pendapat) dan motivasi (dasar pilihan) terhadap obyek-obyek tertentu.

Sedang persepsi politik, menurut Almond dan Sydney Verba (1963 : 13-15), adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kebudayaan politik. Dan istilah kebudayaan politik berhubungan dengan apa yang disebut orientasi politik. Selanjutnya ia mengartikan orientasi politik sebagai "*orientation refers to the internalized aspects of objects and relationships*". Orientasi menunjuk pada aspek-aspek dari obyek politik dan hubungan politik yang terinternalisasikan.

Dalam penguraian berikutnya mengenai orientasi politik, Almond dan Verba (1996 : 16) membaginya menjadi tiga, yakni : 1. **Orientasi kognitif**, berisi tentang pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan tentang system politik, peranan-peranannya, pejabat-pejabatnya serta sisi input maupun output dari system tersebut., 2. **Orientasi afektif**, atau perasaan tentang system, peranan-peranannya, personil maupun penyelenggaraan peranan tersebut, dan 3. **Orientasi evaluative**, yakni pertimbangan atau pendapat tentang obyek politik yang secara tipikal merupakan kombinasi antara standar nilai dan ukuran dengan informasi dan perasaan.

Sedang pengertian obyek politik, menurut David Easton (1965 : 172) dibagi menjadi tiga, yaitu para pejabat, rejim dan masyarakat politik.

Dengan demikian persepsi politik terhadap pilgub Jateng dalam penelitian ini, meliputi tiga dimensi , yaitu :

1. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilgub Jateng? Hal ini diukur melalui indikator; penting-tidak pentingnya jabatan gubernur, penyebutan nama gubernur, informasi pelaksanaan pilgub, sumber informasi pilgub dan kesempatan membicarakan pilgub.
2. Bagaimanakah pendapat atau pandangan masyarakat terhadap figure ideal cagub Jateng? Hal ini diukur melalui indikator, penting-tidaknya kekayaan calon, kualitas calon, semangat calon, kompetensi, kepedulian, dan sebagainya. Uraian lebih lanjut tentang sosok ideal ini, dijelaskan dalam paragraph B.3 di bawah ini.
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada Pilgub Jateng? Hal ini diukur melalui indikator; profesi paling cocok menduduki jabatan gubernur Jateng, dasar menentukan pilihan (diri sendiri-pihak luar), hadir-tidak hadir dalam pilgub Jateng.

Konsep Figur Ideal Cagub. Figur ideal Cagub merupakan gambaran ideal pemilih terhadap seorang Cagub yang dianggap layak, kompeten untuk menduduki jabatan Gubernur Jateng periode lima tahun mendatang. Oleh karena itu, figur ideal memiliki kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penilaian masyarakat menjadi dasar bagi sebuah calon gubernur apakah dirinya memenuhi syarat atau tidak. Mencari figur ideal gubernur pada dasarnya merupakan upaya menemukan seorang pemimpin yang ideal/ sempurna. Padahal di dunia ini tidak ada yang sempurna,

sehingga dipastikan tidak akan ditemukan pemimpin yang sempurna.

Figur Ideal menurut UUD 1945. Ada lima misi figur kepemimpinan menurut konstitusi, yaitu (1) Memajukan kesejahteraan umum; (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (3) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (4) Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan (5) Menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. (lihat Pembukaan UUD 1945, Aline ke 4. Bagi seorang pemimpin, seperti gubernur kelima misi tersebut dapat dipilah menjadi pertama; misi yang memiliki nilai strategis yaitu misi pertama sampai ketiga dan kedua; misi yang dapat dicapai dengan sendirinya lewat keberhasilan mencapai misi-misi strategis (Chaniago, 2008).

Figur Ideal menurut Folklore dan Biblika. Mimpi untuk menemukan figur ideal adalah manusiawi. Pada jaman Junani Kuno, filsuf adalah sosok yang dianggap ideal untuk memimpin. Plato dalam tulisannya "*Republic*" menyatakan bahwa negara dapat direformasi cukup dengan satu persyaratan saja, yaitu bila raja adalah seorang filsuf, atau para raja dan pangeran mempunyai semangat dan kekuasaan sebagaimana dimiliki oleh filsuf, sehingga kekuasaan yang dimiliki dapat menjadi satu dengan kearifan. Selengkapnya, Plato (Strauss & Cropsey, 1964 : 7-8) berkata; "*There might be a reform of the State if only one change was made, which is not slight or easy, when philosophers are kings, or kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, and political greatness and wisdom meet in one*".

Bahkan di jaman yang lebih kuno lagi, yaitu melalui biblikal dan folklore, kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh kekuatan fisik, seperti keahlian dalam berperang (Samsons, Hercules) dan apabila dia seorang perempuan, kualitas kepemimpinannya dilihat dari kecantikannya (antara lain Cleopatra, Ken Dedes). Fenomena inilah oleh Blaise Pascal dinamakan sebagai "*Cleopatra's nose*"; *Had it been shorter, the whole aspect of the world would have been altered*" (Kristiadi, 2008, : 2). Namun sebenarnya, kekuatan politik Cleopatra tidak hanya karena faktor kecantikan belaka, ia juga dikisahkan memiliki karisma, kecerdasan, militan, ambisi dan kemampuan untuk melayani Julius Caesar.

Dalam perkembangan lainnya, di tanah Jawa muncul pemimpin ideal Hasta Brata. Hasta Brata berarti delapan prinsip kepemimpinan sosial yang secara filosofis memiliki sifat-sifat seperti matahari, bulan, langit, bintang, api, laut dan angin. Apa yang tercantum dalam hasta brata sebenarnya merupakan kisi-kisi dalam pilar-pilar kepemimpinan atau hanya sebagai fondasi yang bersifat ideal. Dan nilai-nilai ini pernah dipakai oleh Korps Pamong Praja sebagai Nilai-nilai Kepemimpinan Pamong Praja (Budiardjo, 1984 : 148-150). Konsep ideal kepemimpinan Jawa lainnya, yang menonjol adalah pemikiran Mangku Negara IV dalam serat Wedhatama. Kepemimpinan dianggap ideal jika "*Bonggan kang tan merlokena, mungguh ugering ngaurip. Urip laku tri pakarya, wirya arta tri winasis, kalamun kongsi sepi, saka wilanging tetelu, telas tilasing janma, aji godhong jati aking, temah papa papariman ngulandara*" (Serat Wedhatama, 250 Tahun Pura Mangkunegara, 2008.). Inti ajaran Mangku Negara IV seperti yang dikemukakan di atas adalah mengajarkan syarat-syarat seorang pemimpin harus memiliki martabat atau harga diri ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Karena itu, seorang pemimpin

harus memiliki dan meraih tiga perkara, yaitu kedudukan, kekayaan dan kepandaian.

Figur Ideal menurut Ahli Kepemimpinan. Jika kita kategorisasi, kriteria-kriteria pemimpin dan kepemimpinan ideal oleh ahli kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi dua mazhab (*School of Thought*). Pertama, mereka yang bersetuju bahwa pemimpin harus memiliki beberapa karakter. Misalnya James M. Kouzes & Barry Z. Posner (Kouzes & Posner, 1999 : 46-48), membuat lima belas kriteria kepemimpinan ideal, yaitu : jujur, adil, berkualitas, bersemangat, kompeten, kepedulian, personalitas, integritas, nasionalisme, daya tarik fisik, spiritualitas, karisma, menjadi panutan dan memiliki mata rantai keturunan pemimpin.

Kemudian Ordway Tead (Manullang, 1992 : 17-18), membuat sepuluh kriteria ideal dalam kepemimpinan (managemen), yaitu (1) *Physical and nerve energy*; (2) *A sense of purpose and direction*; (3) *Enthusiasm*; (4) *Frindliness and affection* ; (5) *Integrity*; (6) *Technical Mastery*; (7) *Decisiveness*; (8) *Intelligence*, (9) *Teaching Skill* dan (10) *Faith*.

Sumbangan yang bisa dipetik dari pelbagai kriteria kepemimpinan ideal seperti di atas, adalah kriteria-kriteria itu bukan saja terkait dengan sangsi moral yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin pemerintahan daerah, juga pengaruhnya terhadap efektifitas dan produktifitas pemerintahan. Pemimpin yang nilai moralnya rendah, walaupun ia bisa memperoleh dan mempertahankan kekuasaan karena sistem pemilihan pejabat publik yang buruk, tentu tidak akan memperoleh dukungan nyata dari masyarakat dan kemungkinan lebih buruk lagi adalah menularnya moral buruk tersebut kepada para pendukung/aparatnya.

Namun demikian mashab kepemimpinan yang mendasarkan diri pada kriteria-kriteria atau atas dasar karakter dianggap memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pertama; tidak menyebutkan faktor-faktor/kriteria mana yang paling penting dan yang tidak penting; kelemahan kedua, tidak adanya pengelompokan karakter yang bersifat khusus, sehingga sering terjadi tumpang tindih antara karakter yang satu dengan karakter yang lain; kelemahan ketiga, bagaimana mengatur dari karakter-karakter yang ada agar berdampak efektif terhadap pola tingkah laku seseorang pemimpin; kelemahan keempat, tidak adanya kesepakatan mengenai karakter-karakter/kriteria-kriteria yang bersifat universal; dan yang terakhir, mashab ini tidak dapat membuktikan bahwa seseorang pemimpin dapat sukses disuatu kelompok/tempat tertentu dapat juga berguna dan sukses di kelompok atau tempat lain.

Kritikan-kritikan di atas, mendorong muncullah mashab baru dalam konsep pemikiran yang disebut sebagai kepemimpinan Situasional (*Situationist*). Mashab ini berpandangan bahwa sejumlah karakter yang melekat pada seorang pemimpin memang penting namun karakter tersebut akan berdaya guna dan dirasakan manfaatnya jika dipadukan dengan situasi pada saat dia menjadi pemimpin. Pendukung gagasan ini antara lain Alvin W.Goulner, Albert J.Murphy dan Larry Stout (Arjen; Paul't; Stern & Sundelius, 2005). Tokoh mutakhir mashab ini, Larry Stout, profesor dari Stockholm School of Economics, mengajukan enam persyaratan kapasitas memimpin (*Leadership Capital*) dan empat kondisi (*Leadership Conditions*) yang diperlukan agar kepemimpinan berhasil (Arjen; Paul't; Stern & Sundelius, 2005, : 12-15). Keenam

Leadership Capital adalah (1) Visi, (2) Nilai-nilai keutamaan yang merupakan nilai filosofi pemimpin, (3) Kearifan, (4) Keberanian, (5) Percaya diri dan (6) Kemampuan mempengaruhi orang lain. Sedang keempat Leadership Conditions yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan seseorang adalah (1) Tempat yang tepat dimana pemimpin berada, (2) Kurun waktu pada saat pemimpin memperoleh tugas panggilan sebagai pemimpin, (3) Kedudukan yang dapat digunakan untuk memperoleh kewenangan dan (4) Adanya masyarakat atau pengikut yang bersedia menjadikannya sebagai seorang pemimpin.

Kesimpulannya menjadi seseorang pemimpin bukan hanya memiliki karakter ideal pemimpin tetapi juga karena faktor situasi yang memungkinkan seseorang menjadi pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin dipengaruhi oleh faktor kemampuan memahami masalah, kemampuan menganalisis situasi serta kemampuan bagaimana memecahkan masalah sehingga mampu memberikan solusi yang diharapkan oleh masyarakat banyak.

Figur Ideal menurut Ahli Political Marketing. Tabel atribut citra seorang kandidat politik menurut Schweiger dan Adami (Arjen; Paul't; Stern & Sundelius, 2005: 180).

Tabel 1
Citra Atribut Kandidat Politik

Dimensi	Atribut Positif	Atribut Negatif
Kejujuran	Jujur Kredibel Bisa dipegang ucapannya Transparan Andal Reputasi jujur	Terlibat skandal Penggelapan Melanggar kontrak
Kualitas	Pengetahuan Latar belakang pendidikan Kapabel Perencana berpengalaman	Tak berpengetahuan Mengelola pemerintahan Tidak punya pengetahuan bisnis Tak berpengalaman internasional Tidak qualified
Akar nasional	Representasi negara kita Tahu kebutuhan bangsa Tradisional Berminat dengan kultur kita Cinta tanah air	Tidak tahu sejarah bangsa
Kekuatan	Kuat Pemenang Energik Keras Penuh Kesuksesan	Lemah Pecundang Tanpa tulang punggung
Kegairahan	Mencintai pekerjaannya Perduli pada bangsa Suka membantu Ide - ide modern Gemar olah raga Berorientasi keluarga Muda tahu masalah kita	Keras kepala Tanpa perasaan

Berdasarkan tabel di atas, pemasaran politik memiliki dimensi kejujuran, kualitas, kekuatan, kegairahan dan akar (ketokohan) nasional, dan masing-masing dimensi tersebut memiliki atribut positif maupun negatif. Dimensi kejujuran misalnya, memiliki atribut positif berupa atribut kredibel dan dapat dipercaya, sebaliknya atribut negatifnya berupa terlibat skandal, sering melanggar kontrak/perjanjian/ingkar janji. Dari dimensi kejujuran ini, maka pada proses political marketing, atribut-atribut positif ini ditonjolkan dan atribut negatif sedapat mungkin dapat dipoles/dikurangi, sehingga pemilih dapat memiliki ingatan akan dimensi kejujuran yang dimiliki oleh seorang calon gubernur. Demikian halnya, dimensi kualitas juga memiliki atribut berpengetahuan atau tidak berpengetahuan, kapabel/tidak cakap, dan seterusnya. Dalam konteks pilgub Jateng ini, maka dimensi dari citra politik yang dipakai

adalah, kejujuran/kredibel, kualitas/kapabel.

Sedang dimensi citra politik seperti di atas, dalam pemasaran politik juga harus dikombinasikan dengan instrumen values berupa kompetensi/kerja keras, compassion/pemaaf, sociality/andap – asor dan integritas/jujur. Selain instrumen values, citra politik seseorang juga harus dikemas dengan terminal values berupa nilai-nilai social harmony/suka damai, personal gratification/bermurah hati, self actualization/arif bijaksana. Dengan demikian, kepemimpinan ideal menurut ahli political marketing dalam penelitian ini diukur melalui: kualitas, kompetensi dan integritas. Selengkapnya mengenai, instrumen values dan terminal values, lihat tabel dibawah ini.

Tabel nilai instrumental dan Terminal (dikutip J.P Peter dan J.C. Olson, hal 181)

Tabel 2
Nilai Instrumental dan Terminal

Instrumen values	Terminal values
Competence	Social Harmony
♦ Ambitious	♦ World at peace
♦ (hardworking)	♦ Equality (brotherhood)
♦ Independent (self reliant)	♦ Freedom (independence)
♦ Imaginative (creative)	♦ National security
♦ Capable (Competent)	♦ Salvation (eternal life)
♦ Logical (Rational)	Personal gratification
♦ Courageous	♦ Social recognition
Compassion	♦ Comfortable life
♦ Forgiving (pardon others)	♦ Pleasure (enjoyable life)
♦ Helpful (work for others)	♦ Sense of accomplishment
♦ Cheerful (joyful)	Self actualization
♦ Loving (affectionare)	♦ Beauty (nature and art)
Sociality	♦ Wisdom (understanding)
♦ Polite (courteous)	♦ Inner harmony (no conflict)
♦ Obedient (dutiful)	♦ Self respect (self esteem)
♦ Clean (neat, tidy)	♦ Sense of accomplishment
Integrity	Security
♦ Responsible (reliable)	♦ Taking care of family
♦ Honest (sincere)	♦ Salvation eternal life
♦ Self controlled	Love and affection
	♦ Mature love (sexual and spiritual intimacy)
	♦ True friendship (close companionship)
	Personal contentedness
	♦ Happiness (contentment)

Sejalan dengan pemikiran tentang figur ideal tersebut di atas, maka konsep figur ideal Cagub Jateng dalam penelitian ini adalah figur/pemimpin yang dapat mengkombinasikan kapasitas pribadi dengan situasi kongkrit atau tantangan yang dihadapi oleh Cagub Jateng 2008-2003 untuk mencapai tujuan bersama. Sedang indikator figur/sosok ideal Cagub Jateng adalah:

1. Kemampuan Ekonomi (kekayaan calon gubernur);
2. Berkualitas (berpengetahuan, pendidikan baik, kapabel, perencana program kerja, pengalaman, tahu masalah);
3. Kompeten (ambisi, mandiri, imajinatif, kapabel, rasional);
4. Integritas (tanggung jawab, jujur, tidak KKN, kredibel, bisa dipercaya);
5. Daya tarik fisik (gagah, rupawan, cantik);
6. Kesamaan parpol;
7. Kesamaan Organisasi;
8. Menjadi ikon/ trendsetter dimasyarakat.

Hasil Penelitian

Sosok Ideal Cagub. Mayoritas responden (24,3%) menginginkan sosok cagub berasal dari TNI/Polri. Alasannya, responden menginginkan kepemimpinan cagub yang berasal dari TNI/POLRI karena sosok TNI dianggap dapat bersikap tegas dan *me-ngayomi* sehingga kondisi masyarakat Jateng yang dikenal aman tentram dapat terjamin. Responden menginginkan rakyat dapat tenang dalam bekerja, sehingga jagad mitologi Jawa *tata-tentrem karta raharja* atau aman- sejahtera tidak terganggu. Harapan responden seperti ini, dapat terpenuhi jika Cagub dari TNI yang terpilih. Untuk selengkapnya, lihat tabel 3. Tentang Sosok Ideal Cagub dilihat dari Profesi.

Tabel 3
Sosok Ideal Cagub

Profesi Paling Cocok Untuk Gubernur	Frekuensi	Persentase
Akademisi	233	9,7 %
Ulama'	236	9,8 %
Birokrat/PNS	312	13,0 %
TNI/POLRI	584	24,3 %
Pengusaha	160	6,6 %
Pendidik/ Guru	67	2,8 %
Politisi Partai	153	6,4 %
Petani/ Nelayan	54	2,2 %
Tokoh LSM	66	2,7 %
Lainnya	543	22,5%
TOTAL	2408	100 %

Sumber : Daftar Pertanyaan C. nomor 1.

Namun, persoalannya tidak berhenti disini, karena di Pilgub Jateng ada dua Cagub yang berasal dari TNI, yaitu Bibit Waluyo dan Agus Suyitno. Mengapa Agus Suyitno justru menjadi juru kunci. Unggulnya Bibit atas Agus Suyitno dapat dijelaskan karena Bibit memiliki modal pokok yaitu Rustri. Ia seorang bupati perempuan (Bupati Kebumen), aktivis PDIP yang menjadi pejabat politik dan dianggap sukses dalam mengelola jalannya pemerintahan atau paling tidak, sukses dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya, lewat acara *Selamat Pagi Ibu Bupati*. Adanya Rustriningsih ini sebenarnya yang membantu para simpatisan PDI P dan sudah barang tentu mesin partai tidak mengganggu kinerja mesin politik Bibit-Rustri. Sebaliknya, Cagub Agus Suyitno, disamping mengalami dampak perseteruan elite PKB ditingkat Nasional, juga mengalami fragmentasi dukungan pada level "grassroots", yaitu warga nadliyin. Warga NU terpecah pada ketiga pasangan, yaitu Adnan (Bambang-Adnan), Tamzil (Tamzil-Rais), Kholiq (Agus-Kholiq).

Persepsi Pemilih Terhadap Kepemimpinan Ideal Cagub Jateng. Ada 8 ciri kepemimpinan ideal yang diharapkan dimiliki oleh Cagub Jateng, namun yang dianggap paling penting oleh pemilih adalah ciri kepemimpinan yang memiliki integritas (98,4%), memiliki kualitas (95,6%) dan kompeten dibidangnya (86,2%). Selengkapnya, lihat tabel 4 tentang Persepsi Pemilih terhadap kepemimpinan ideal Cagub Jateng di bawah ini.

Tabel 4
Persepsi Terhadap Kepemimpinan Ideal Cagub Jateng

Persepsi	Penting	Cukup Penting	Tidak Penting	Tidak Jawab	TOTAL
Ekonomi	1382 (57,4%)	401 (16,7%)	618 (25,7%)	7 (0,3%)	2408 (100%)
Kualitas	2302 (95,6%)	70 (2,9%)	35 (1,5%)	1 (0,0%)	2408 (100%)
Kompeten	2076 (86,2%)	228 (9,5%)	101 (4,2%)	3 (0,1%)	2408 (100%)
Integritas	2369 (98,4%)	26 (1,1%)	13 (0,5%)	0	2408 (100%)
Daya Tarik Fisik	551 (22,9%)	443 (18,4%)	1414 (58,7%)	0	2408 (100%)
Gender	567 (23,5%)	380 (15,8%)	1460 (60,6%)	1 (0,0%)	2408 (100%)
Kesamaan Parpol	522 (21,7%)	282 (11,7%)	1603 (66,6%)	1 (0,0%)	2408 (100%)
Menjadi Ikon	1552 (64,5%)	377 (15,7%)	479 (19,9%)	0	2408 (100%)

Sumber : Daftar Pertanyaan B nomor 1-8

Fenomena seperti di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden menyukai calon Gubernur yang memiliki tiga ciri keutamaan, yaitu jujur (bahasa Jawa; polos), bisa dipercaya, dan rendah hati (tidak keminter). Dari ketiga ciri keutamaan ini, baik melalui *debat public* maupun penampilan, sosok Bibit paling mendekati ketiga ciri tersebut. Dalam debat Cagub, misalnya Bibit tampak paling polos dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis. Kalau tidak bisa menjawab, ia berterus terang. Kemudian, jika dilihat dari *track record* dia selama berkariir di TNI-AD, sosok bisa dipercaya lebih menonjol jika dibandingkan dengan pasangan Cagub lain. Artinya, kariir Bibit telah teruji, dan berhasil mengatasi krisis ketika memimpin Kodam IV Diponegoro (Jatuhnya Soeharto), *Impeachment* Gus Dur, ketika jadi Pangdam Jaya. Dan yang jelas, dari penampilannya, sosok Bibit merupakan representasi dari *wong deso*, sehingga tidak berlebihan model kampanye Bibit *Bali neng ndeso*, *mbangun deso* memang cocok dengan situasi masyarakat Jateng sekarang ini.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah persepsi masyarakat mengenai tidak pentingnya kesamaan parpol (66,6%), gender (60,6%) dan daya tarik fisik (58,7%) dalam ciri kepemimpinan ideal Cagub Jateng. Adanya persepsi masyarakat bahwa kesamaan parpol tidak penting dalam menentukan kepemimpinan Cagub Jateng, mengindikasikan bahwa keberhasilan Cagub (pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih) yang didukung oleh Partai (PDIP yang mayoritas dalam perolehan suara maupun kursi DPRD pada pemilu 2004) semata-mata adalah adanya kesesuaian figur calon gubernur yang diusung PDIP dengan harapan-harapan pemilih. Kebetulan, harapan pemilih pada pilgub Jateng yang lalu, adalah pada Figur yang bisa bersikap tegas, bisa ngayomi yang mempresentasikan jagad mitologi Jawa yang "tenteram dan sejahtera" ada pada diri Bibit Waluyo (tenteram, karena berhasil menjaga keamanan ketika menjadi Pangdam Diponegoro), Rustriningsih (sejahtera, karena berhasil sebagai Bupati Kebumen) dan yang lebih penting adalah ketiga ciri keutamaan kepemimpinan Jawa "polos, bisa dipercaya dan tidak keminter" ada pada model kepemimpinan Bibit Waluyo atau paling tidak, Bibit Waluyo mampu menampakkan diri sebagai Cagub yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan Jawa, yang *nota bene* menjadi harapan bagi sebagian besar masyarakat Jateng.

Demikian halnya, mengenai daya tarik fisik atau Cleopatra's Nose dan dalam konteks kepemimpinan Jawa sering disebut "*katuranggan*". Mengapa konsep daya tarik fisik tidak dianggap penting oleh pemilih bagi kepemimpinan ideal Cagub Jateng 2008 yang lalu? Menurut hasil wawancara mendalam penulis terhadap sejumlah responden mereka menyatakan bahwa "3 ciri keutamaan kepemimpinan Jawa, yaitu jujur, bisa dipercaya dan tidak keminter" sesungguhnya melebihi konsep *katuranggan*, karena ciri keutamaan kepemimpinan Jawa dapat diterapkan pada kepemimpinan yang demokratis seperti pada Pilgub/Pilkada, sedang konsep *katuranggan* mengindikasikan pada kepemimpinan ideal non-demokratik dan hanya cocok bagi kepemimpinan non-demokratik (yang tidak dipilih), bukan pada kepemimpinan pada Pilgub Jateng yang demokratis.

Sedang mengenai adanya persepsi responden yang menganggap gender tidak penting dalam kepemimpinan ideal Cagub Jateng dapat

dijelaskan sebagai berikut : Sosok Ideal di atas, dimana harapan masyarakat pemilih lebih pada sosok pemimpin yang bisa menjaga jagad mitologi Jawa "tenteram dan sejahtera" dimana Bibit- Waluyo yang berlatar belakang militer dianggap mempresentasikan "tenteram" dan Rustriningsih yang berlatarbelakang sebagai Bupati Kebumen dua periode yang relatif sukses sehingga merepresentasikan "sejahtera". Dengan demikian, pemilih memilih pasangan Bibit Waluyo- Rustriningsih, bukan semata-mata karena salah satu pasangannya (Cawagub) adalah seorang perempuan, meskipun faktor kandidat perempuan satu-satunya dalam Pilgub Jateng juga merupakan salah satu daya tarik bagi pemilih perempuan tidak bisa dinafikan. Disamping itu, persoalan tampilnya perempuan dalam panggung politik pada Pilkada di Jateng bukan sesuatu yang baru. Selain di Kabupaten Kebumen, banyak dijumpai tokoh perempuan yang terpilih sebagai Bupati, seperti di Kabupaten Demak (Endang Setyaning Dyah periode 2001-2006), Kabupaten Karanganyar (Rina pada periode 2002-2008) dan Siti Qomariyah di Kabupaten Pekalongan periode 2006-2011. Demikian halnya jabatan wakil bupati, juga ada beberapa yang dipegang oleh perempuan. Seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Semarang. Dan masih banyak perempuan di Jateng yang menduduki jabatan-jabatan politik lainnya, seperti anggota DPRD. Tidak mengherankan jika persepsi pemilih pada Pilgub Jateng mayoritas menganggap tidak penting gender sebagai salah satu ciri kepemimpinan ideal pada Pilgub Jateng 2008 yang lalu.

Perilaku Memilih. Jika dilihat dari pengetahuan responden terhadap arti pentingnya jabatan gubernur Jateng bagi terwujudnya Jawa-Tengah yang "Tenteram dan Sejahtera", ternyata mayoritas responden (90,4%) menganggap jabatan gubernur Jateng sekarang ini kurang signifikan/kurang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya lihat tabel 5 tentang Arti Pentingnya Jabatan Gubernur di bawah ini:

Tabel 5
Arti Pentingnya Jabatan Gubernur

Persepsi Tentang Jabatan Gubernur	Frequency	Percent
Tidak Penting	2177	90,4
Penting	231	9,6
Total	2408	100,0

Sumber : Pertanyaan A Nomor 3.

Kurang pentingnya jabatan gubernur pada era pilkada langsung/otonomi daerah ini, dimaknai bahwa jabatan gubernur sekarang ini terlalu jauh dengan kepentingan masyarakat Jateng. Hampir sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka merasa agak jauh "ikatan emosional" dengan jabatan Gubernur jika dibandingkan dengan jabatan bupati/walikota apalagi Kepala Desa. Selama ini, pemilih sudah terbiasa berurusan dengan Bupati/walikota dalam persoalan pembangunan, urusan sekolah gratis, pelayanan kesehatan, sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan sehari telah terbiasa berurusan dengan Bupati/ Wali kota. Berurusan dengan gubernur tampaknya terlalu jauh.

Fenomena kurang dekatnya jabatan Gubernur ini, dapat kita lihat pada saat kampanye, dimana para pemilih *adem ayem*, tidak semeriah pada pilkada bupati/walikota. Kondisi *adem ayem* pemilih di satu pihak, dan "kurang eratnya ikatan emosional" figure Cagub Jateng dengan pemilihnya menyebabkan perilaku pemilih Jateng berkecenderungan pada perilaku memilih *sociology model* dan secara *cultural* masyarakat Jateng memang masih menginginkan pada "sosok kepemimpinan *njawani*", dimana Figur calon kepala daerah yang *njawani* merupakan faktor penentu kemenangan seorang calon, bukan preferensi politik/ mesin partai sebagaimana yang sering diinterpretasikan oleh pelbagai kalangan (Lingkaran Survei Indonesia, 2008).

Faktor lain, untuk menjelaskan pentingnya "kepemimpinan *njawani*", adalah minimnya politik uang. Selama ini, masyarakat di Jawa Tengah sudah terbiasa melihat peristiwa politik, seperti pilkada baik pilkada bupati maupun pilkada walikota, dianggap sebagai representasi pemilihan kepala desa (pilkades) dalam jangkauan yang lebih luas. Pemilih sudah terbiasa menganggap peristiwa politik tersebut sebagai sebuah perhelatan/pesta rakyat. Selama pilkades, pemilih terbiasa dinabobokkan dengan pemberian *shodaqoh* dari seorang calon, bisa berupa natura (seperti kain sarung untuk pemilih pria dan kain kebaya untuk wanita) maupun yang berujud uang, sebagai pengganti upah bekerja. Demikian halnya, pada pilkada Bupati/Walikota yang selama ini telah berlangsung di Jawa-Tengah, dimana pemberian *shodaqoh* merupakan salah satu faktor kedekatan emosional seorang calon Bupati/Walikota.

Persoalannya, mengapa fenomena kedekatan emosional lewat *shodaqoh* tersebut kurang menggejala dalam Pilgub Jateng 2008? Jawabannya, pemilih pilgub Jateng terlalu besar dan tersebar secara luas di 35 Kabupaten/Kota, sehingga kemampuan finansial Cagub tampaknya kurang memadai untuk mengkover jumlah pemilih yang besar. Bisa dibayangkan, bila seorang Cagub memberi *shodaqoh* Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada tiga juta pemilih, misalnya, maka Cagub akan menghabiskan biaya *shodaqoh* sebesar Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah). Besarnya biaya *shodaqoh* ini, dan luasnya wilayah Jateng menyebabkan kecenderungan perilaku memilih pada Pilgub Jateng 2008 ini berbeda dengan pilkada bupati/walikota. Minimnya, gejala politik uang pada pilgub ini, merupakan salah satu faktor penyebab berperannya kepemimpinan *njawani*/kepemimpinan lokal dalam Pilgub Jateng yang pada akhirnya mengantarkan kemenangan Bibit-Rustris dan tidak signifikannya suara yang diperoleh pasangan Sukawi-Sutarip pada pilgub Jateng, padahal pasangan ini secara ekonomi paling kuat.

Penutup

Kesimpulan. Belajar dari Pilgub Jateng 2008, terutama fenomena kemenangan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam Pilgub Jateng, ada beberapa pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik :

1. Bingkai sosio-kultural pemilih, dalam hal ini persepsi pemilih terhadap sosok ideal cagub, kepemimpinan lokal ideal cagub memiliki andil yang cukup besar dalam pilkada langsung di Jateng pada 22 Juni 2008 yang lalu. Hal ini, mengindikasikan bahwa jika sosok dan model kepemimpinan Cagub yang diusung

oleh parpol sesuai atau mendekati harapan-harapan akan sosok dan kepemimpinan ideal masyarakat – pemilih setempat, maka Cagub yang bersangkutan memiliki peluang terpilih dalam Pilgub.

2. Kecenderungan perilaku memilih "*sociologi model*" sebagaimana yang ditemukan dalam Pilgub Jateng 2008, secara kait-mengait memperjelas akan pentingnya kepemimpinan lokal (*njawani*) dalam Pilkada Langsung. Fenomena ini, dapat ditafsirkan bahwa kemenangan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih merupakan andil dari gabungan faktor masih menguatnya sosok dan kepemimpinan lokal dan kecenderungan perilaku memilih.

Saran. Belajar dari fenomena kemenangan pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dalam Pilgub Jateng 2008 yang menghasilkan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur yang memiliki kepemimpinan *njawani*/lokal disatu pihak, dan tema besar Seminar Nasional AIPI XXIII "Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi & Kebangsaan Di Indonesia" di lain pihak, maka perlu adanya diskursus-diskursus, penelitian-penelitian akan pentingnya relevansi dan signifikansi elemen-elemen kepemimpinan lokal (yang sering dianggap anti terhadap proses demokratisasi lewat Pilkada), terhadap penguatan demokratisasi dan kebangsaan di Indonesia. Pilgub Jateng merupakan salah satu bahan pelajaran bagi kita semua, bahwa unsur kepemimpinan khas Jateng ternyata mewarnai dan memperkuat demokratisasi (lokal) yang aman dan relatif tidak terjadi konflik horizontal sebagaimana sering terjadi pada pilkada-pilkada di tempat lain.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A & Sydney Verba (1963). *The Civic Culture, Political Attitude and Democracy in Five Nations*, Princeton : Princeton University Press,
- Boin, Arjen; Paul't; Stern, Eric & Sundelius, Bengt (2005). *The politics Of Crisis Managemen : Public Leadership Under Pressure*, Cambridge University Press.
- Budiardjo, Miriam (1984). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Chaniago, Andrinov (2008). *Kepemimpinan Politik*, Makalah Seminar XXII AIPI di Banjarmasin.
- Easton, David (1965). *A System Analisis of Political Life*, New York : John Wiley & Sons Inc.
- Gaffar, Affan (1992). *Javanese Votters : A Case Of Election Under A Hegemonic Party System*, Yogyakarta : UGM Press,
- Kristiadi, J (2008). *Sosok Ideal Calon Presiden 1999-2004*, makalah seminar AIPI XXII, Banjarmasin.
- Kouzes, James M & Barry Z. Posner (1999). *The Leadership Challenge*, Jakarta : Penerbit Interaksara,
- Manullang, (1992) *Prinsip-prinsip Managemen*, Jakarta : Binaaksara.

Norpoth, Helmut (1996). *Presiden and the Prospective Voter, The Journal Politics*, Vol.58, No.3.

Peter, J.P, dan J.C. Olson (1999). *Consumer Behaviour and marketing Strategy third edition*, Boston : Irwin.

Strauss, Leo & Joseph Cropsey (1964). *History of Political Philosophy*, Chicago : Rand Mc.Nally&Co.

Surbakti, Ramlan (1992) . *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo

Schweiger dan Adami (1987). "The Nonverbal Image of Politician and Political Parties", LB Newman (ed), *Hand of book of Political Marketing*, California : Sage Publication.

Walgito, Bimo, (1994). *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM,

----- (2007). *Kajian Bulanan, Perilaku Pemilih Pada Pilkada, Lingkaran Survei Indonesia*

----- (2008). *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia, Mesin Partai Dalam Pilkada: Kasus Pilkada Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, Edisi XV*

----- (2008). *Serat Wedhatama, 250 Tahun Pura Mangkunegara*